

Katalog : 4101002.3327

# STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PEMALANG 2016



<http://pemalang.kab.bps.go.id>

# STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PEMALANG 2016



<http://pemalang.kab.bps.go.id>

---

# **STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

## **KABUPATEN PEMALANG**

### **TAHUN 2016**

No Katalog BPS : 4101002.3327

No Publikasi : 33270.17.06

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : ix+ 33

Naskah :  
Seksi Statistik Sosial

Penyunting :  
Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit :  
Seksi IPDS

Diterbitkan:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

---

## KATA PENGANTAR

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang 2016 menyajikan gambaran tentang taraf kesejahteraan rakyat, perkembangannya antar waktu dan perbandingan antar jenis kelamin. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas yang tidak semuanya dapat diukur.

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Informasi umum tentang kesejahteraan yang tercakup dalam publikasi ini antara lain meliputi bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014, 2015 dan 2016.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Pemalang, September 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Pemalang



Dra. Prita Rextiana, MM  
NIP. 19660322 199103 2 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISTILAH TEKNIS</b>	viii
<b>BAB I KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
1.1 Kondisi Wilayah	1
1.2 Jumlah Penduduk	1
1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	2
1.4 Rasio Jenis Kelamin	3
1.5 Struktur Umur	4
1.6 Rasio Ketergantungan	5
1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama, dan Keluarga Berencana	7
<b>BAB II KESEHATAN</b>	
2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat	13
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	14
2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan	18
<b>BAB III PENDIDIKAN</b>	
3.1 Tingkat Pendidikan	21
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	23
3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)	24
3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)	25
<b>BAB IV PERUMAHAN</b>	
4.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal	28
4.2 Penguasaan Tempat Tinggal	30
4.3 Fasilitas Perumahan	30
4.4 Penguasaan Alat Komunikasi	31

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	2
Tabel 1.2	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016	3
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Kabupaten Pemalang Tahun 2016	4
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016	5
Tabel 1.5	Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016	6
Tabel 1.6	Rasio Ketergantungan Penduduk dan Proporsi Penduduk Usia Produktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	6
Tabel 1.7	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	8
Tabel 1.8	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Digunakan, Kabupaten Pemalang Tahun 2016	10
Tabel 2.1	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	14
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang, 2015-2016	15
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2016	16
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat, Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2016	16
Tabel 2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Terakhir Proses Persalinan, Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	17
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2016	18
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	22
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	23
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016	25

---

Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pemalang, 2014-2016	26
Tabel 4.1	Persentase Rumahtangga menurut Rata-rata Luas Lantai di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016	29
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan, Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016	29
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016	30
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016	31
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, dan Komputer di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016	31

---

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2016	4
Gambar 1.2 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Partisipasi ber-KB di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	9
Gambar 1.3 Persentase Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016	9

<http://pemalangkab.bps.go.id>



---

## DAFTAR ISTILAH TEKNIS

### KEPENDUDUKAN

#### 1. Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.

#### 2. Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

#### 3. Rasio Ketergantungan

Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun/anak-anak dan 65 tahun ke atas/lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.

#### 4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

Rata-rata umur seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan yang pertama kali.

#### 5. Partisipasi Keluarga Berencana

Proporsi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

#### 6. Kontrasepsi Tetap (Kontap)

Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi: MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant.

### KESEHATAN

#### 1. Angka Kesakitan/Morbiditas

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitasnya. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

---

## **PENDIDIKAN**

### 1. APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

### 2. APM (Angka Partisipasi Murni)

Proporsi jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.

### 3. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

## **PERUMAHAN**

### 1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

### 2. Dinding Rumah

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain.

### 3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

### 4. Fasilitas Air Minum

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.

### 5. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban.

---

# **BAB I**

# **KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

<http://pemalang.go.id>

---

## **BAB I**

### **KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **1.1 Kondisi Wilayah**

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya diapit oleh dua kabupaten di jalur Pantura yaitu Kabupaten Tegal sebagai batas sebelah barat dan Kabupaten Pekalongan sebagai batas sebelah timur. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan. Luas wilayah Pemalang pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.115,30 Km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 383,51 Km<sup>2</sup> (34,39 persen) lahan sawah dan 731,79 Km<sup>2</sup> (65,61 persen) bukan lahan sawah.

#### **1.2 Jumlah Penduduk**

Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menjadi acuan dalam penghitungan jumlah penduduk yang menjadi dasar dalam penghitungan proyeksi jumlah penduduk.

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan dan papan. Permasalahan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Penyediaan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan pemukiman kumuh, liar, dan tidak layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2016 adalah sebesar 1.292.573 jiwa dengan menggunakan hasil penghitungan proyeksi penduduk yang mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010). Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebesar 4.007 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 1.288.566 jiwa. Secara regional, Kabupaten Pemalang dengan penduduk 1,292 juta jiwa termasuk kabupaten dengan jumlah penduduk relatif tinggi.

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk perempuan mencapai 50,50 persen sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki sekitar 49,50 persen pada tahun 2016. Kondisi tersebut juga terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015 yang menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan lebih tinggi jika di bandingkan persentase penduduk laki-laki.

**Tabel 1.1:**  
**Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	49,50	49,50	49,50
Perempuan	50,50	50,50	50,50
Laki-laki + Perempuan	100,00	100,00	100,00
Jumlah	1.284.236	1.288.566	1.292.573

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

### **1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk antar daerah yang kurang merata menimbulkan masalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata juga mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan luas wilayahnya yang dihitung dalam satuan jiwa per km persegi. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak sedangkan lahan dan luas wilayah tidaklah bertambah.

Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai ketimpangan fasilitas dan sumber daya antar kecamatan tersebut. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak diimbangi dengan memadainya lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, tidak tercukupinya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Bagi kecamatan dengan jumlah yang sedikit akan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian yang luas sehingga menyebabkan sumber-sumber daya alam/kekayaan yang ada tidak atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan Tabel 1.2, Kecamatan Pemalang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang, yakni sebesar 177.602 jiwa atau 13,74 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang.

Sedangkan Kecamatan Warungpring merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit sebesar 38.846 jiwa atau 3,01 persen.

Bila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2016 kepadatan penduduk di seluruh kecamatan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 1.158 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Comal yang mencapai sekitar 3.346 jiwa setiap kilometer persegi, diikuti Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 2.399 jiwa setiap kilometer persegi dan 1.805 jiwa setiap kilometer persegi. Sementara itu, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bodeh (633 jiwa setiap kilometer persegi), Kecamatan Bantarbolang (516 jiwa setiap kilometer persegi) dan Kecamatan Watukumpul (502 jiwa setiap kilometer persegi).

**Tabel 1.2:**  
**Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Persentase	Kepadatan Per Km <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moga	41,41	31,501	31,975	63,476	4.91	1.532,87
Warungpring	26,31	19,175	19,671	38,846	3.01	1.476,46
Pulosari	87,52	27,703	28,152	55,855	4.32	638,19
Belik	124,54	52,415	52,037	104,452	8.08	838,70
Watukumpul	129,02	32,222	32,551	64,772	5.01	502,03
Bodeh	85,98	27,103	27,400	54,503	4.22	633,90
Bantarbolang	139,19	34,626	37,229	71,856	5.56	516,24
Randudongkal	90,32	47,504	49,927	97,430	7.54	1.078,73
Pemalang	101,93	87,907	89,695	177,602	13.74	1.742,39
Taman	67,41	80,234	81,508	161,742	12.51	2.399,38
Petarukan	81,29	72,663	74,098	146,760	11.35	1.805,39
Ampelgading	53,3	32,717	33,751	66,468	5.14	1.247,05
Comal	26,54	44,170	44,633	88,804	6.87	3.346,04
Ulujami	60,55	49,856	50,150	100,006	7.74	1.651,63
J u m l a h	1.115,30	639,797	652,776	1,292,573	100.00	1.158,95

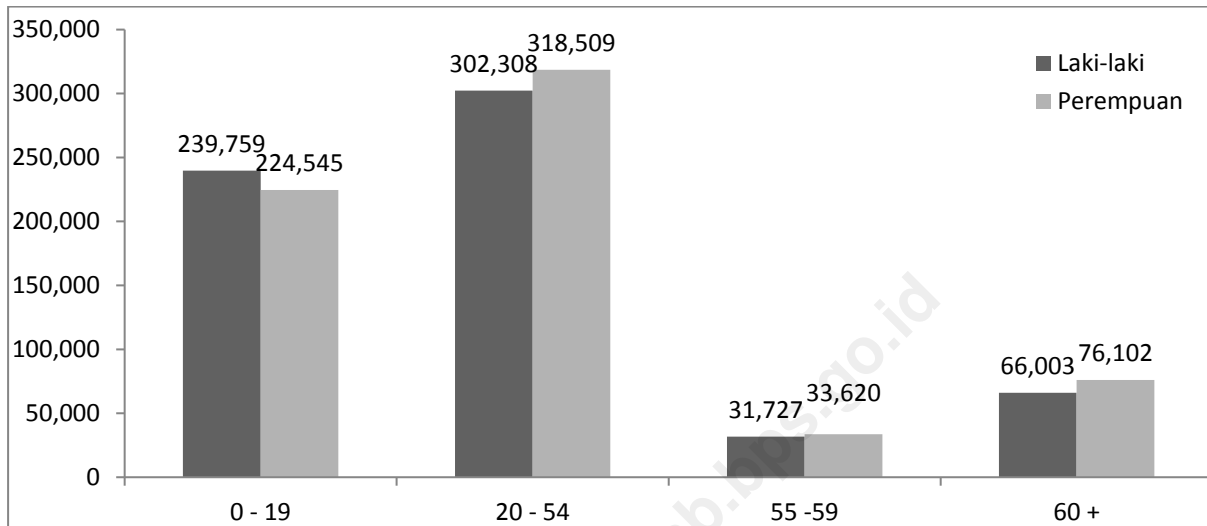
Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

#### 1.4 Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk tahun 2016 di Pemalang menurut hasil proyeksi SP2010 diperkirakan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yakni 652.776 jiwa berbanding 639.797 jiwa. Dengan nilai rasio jenis kelamin *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2016*

(sex ratio) sebesar 98,01 hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2016 di Kabupaten Pemalang terdapat 98 orang laki-laki pada setiap 100 orang perempuan.

**Gambar 1.1:**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2016**



Dilihat menurut kelompok umur, hanya kelompok penduduk berumur 0-19 tahun yang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan (Gambar 1.1). Sedangkan untuk kelompok umur yang lebih tinggi jumlah perempuan selalu lebih banyak dari jumlah laki-laki.

Jika dilihat di Gambar 1.3, rasio jenis kelamin secara berangsur-angsur terus menurun sejalan dengan kenaikan umur, selanjutnya pada kelompok umur tua rasio jenis kelamin semakin jauh di bawah angka 100.

### 1.5 Struktur Umur

Struktur umur penduduk Pemalang mengalami transisi menuju ke penduduk tua. Struktur tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia dewasa (15-64 tahun) serta kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Berdasarkan pengolahan proyeksi penduduk Kabupaten Pemalang, penduduk laki-laki muda yang berumur 0 sampai dengan 14 tahun pada tahun 2016 tercatat sebesar 51,50 persen, atau lebih tinggi dibanding penduduk perempuan muda yang tercatat sebesar 48,50 persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas), dimana persentase penduduk laki-laki, masing-masing sebesar 49,23 persen dan 44,42 persen, lebih rendah dibanding persentase penduduk perempuan, masing-masing sebesar 50,77 persen dan 55,58 persen.

**Tabel 1.3:**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

Kelompok Umur	L		P		L + P	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 14	178.694	51,50	168.285	48,50	346.979	100,00
15 - 64	420.618	49,23	433.829	50,77	854.447	100,00
65 +	40.485	44,42	50.662	55,58	91.147	100,00
Jumlah	639.797	49,50	652.776	50,50	1.292.573	100,00

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

### 1.6 Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator kependudukan lainnya yang mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya perubahan struktur penduduk menurut umur adalah angka rasio ketergantungan. Angka ini diartikan sebagai banyaknya penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Secara fungsional, indikator ini dari tahun ke tahun cenderung semakin rendah sebagai akibat turunnya jumlah penduduk usia muda dan naiknya jumlah penduduk usia produktif.

Tabel 1.4 terlihat distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 26,84 persen penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2016 yang berusia muda, 66,10 persen berusia produktif, dan hanya 7,05 persen yang berumur 65 tahun ke atas, sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan penduduk Pemalang tahun 2016 sebesar 51,28. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk usia tidak produktif.

**Tabel 1.4:**  
**Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	27.93	25.78	26.84
15 - 64	65.74	66.46	66.10
65 +	6.33	7.76	7.05

Sumber: SP2010, Angka Proyeksi Penduduk

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa beban tanggungan pada penduduk produktif laki-laki (52,11) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk produktif perempuan (50,46). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan mempengaruhi

*Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2016* 5



tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah.

**Tabel 1.5:**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Muda</b>	<b>Tua</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	42.48	9.63	52.11
Perempuan	38.79	11.68	50.47
Laki-laki + Perempuan	40.61	10.67	51.28

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

Tingginya persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Pemalang (26,84 persen) menyebabkan tingginya rasio ketergantungan penduduk muda (40,61) dibandingkan rasio ketergantungan penduduk tua (10,40). Ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan di Kabupaten Pemalang masih perlu diprioritaskan pada penduduk usia muda (0-14 tahun) khususnya di bidang pendidikan.

**Tabel 1.6:**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk dan Proporsi Penduduk Usia Produktif Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

<b>Kecamatan</b>	<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>Persentase Penduduk Usia Produktif</b>
(1)	(2)	(3)
Moga	59.97	62.51
Warungpring	57.44	63.52
Pulosari	50.95	66.25
Belik	53.75	65.04
Watukumpul	56.23	64.01
Bodeh	52.81	65.44
Bantarbolang	52.83	65.43
Randudongkal	50.07	66.64
Pemalang	46.84	68.10
Taman	50.04	66.65
Petarukan	50.90	66.27
Ampelgading	51.08	66.19
Comal	47.09	67.98
Ulujami	52.18	65.71
Kab. Pemalang	51.28	66.10

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk

Proporsi penduduk usia produktif tertinggi di Kabupaten Pemalang ada di Kecamatan Pemalang (68,10 persen). Hal ini mengakibatkan angka rasio ketergantungan di Kecamatan Pemalang paling rendah (46,84) dibandingkan angka rasio ketergantungan kecamatan lainnya. Sebaliknya proporsi penduduk usia produktif terendah di Kecamatan Moga (62,51 persen), dimana angka rasio ketergantungannya paling tinggi mencapai 59,97. Perbandingan angka rasio ketergantungan antar kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 1.6.

### **1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama, dan Keluarga Berencana**

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi masuk. Tingkat kelahiran di masa lalu memengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Jumlah kelahiran yang tinggi di masa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi akan menyebabkan bayi-bayi tersebut tetap hidup dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disaat kematian bayi masih tinggi. Lima belas tahun kemudian bayi-bayi ini akan membentuk kelompok perempuan usia subur.

Pembangunan dan perbaikan keadaan sosial ekonomi penduduk akan mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran. Namun pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi mempunyai dampak yang sangat lambat terhadap penurunan tingkat kelahiran. Mengingat hal tersebut dan rawannya masalah kependudukan maka diperlukan usaha-usaha yang dapat menurunkan tingkat kelahiran secara langsung dan lebih cepat. Usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana.

Umur perkawinan, khususnya bagi wanita merupakan ciri kependudukan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat kelahiran. Oleh karena itu, usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran perlu pula didukung oleh usaha untuk menaikkan umur perkawinan. Semakin tinggi umur perkawinan menyebabkan masa reproduksi wanita lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita menjadi suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa umur minimum laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun sementara itu umur minimum perempuan untuk menikah adalah 16 tahun.

**Tabel 1.7:**  
**Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pematang Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
< 17 th	23,53	7,12	22,40
17-18 th	28,94	19,56	24,55
19-24 th	38,76	64,62	43,19
25 th+	8,77	8,70	9,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014-2016

Tabel 1.7 menunjukkan, pada tahun 2016 sebanyak 43,19 persen wanita di Kabupaten Pematang menikah pertama kali pada umur antara 19-24 tahun dan hanya 9,86 persen yang menikah pada umur 25 tahun ke atas. Sedangkan wanita yang menikah pertama kali pada umur 18 tahun ke bawah sebanyak 46,95 persen.

Berdasarkan Tabel 1.8, persentase wanita yang melangsungkan perkawinan pada umur lebih muda (<17 tahun) menurun dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan naik pada tahun 2016. Pada tahun 2014 persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun sekitar 23,53 persen menjadi 7,12 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 persentasenya naik menjadi 22,40 persen.

Persentase wanita yang menikah pada umur 17-18 tahun mengalami penurunan dan kenaikan selama periode 2014-2016. Pada tahun 2014 persentase wanita yang menikah pada umur 17-18 tahun sekitar 28,94 persen, turun menjadi 19,56 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 naik menjadi 24,55 persen.

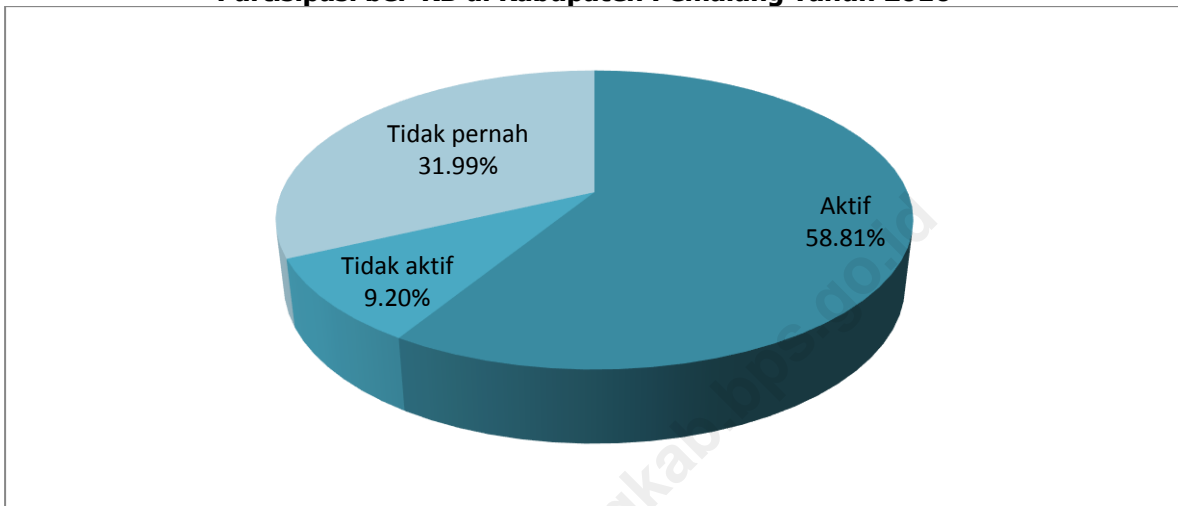
Persentase wanita yang menikah pada umur 19-24 tahun meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016. Pada tahun 2014 persentase wanita yang menikah pada umur 19-24 tahun sekitar 38,76 persen dan meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 64,62 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 43,19 persen.

Persentase wanita yang menikah pada umur 25 tahun ke atas mengalami fluktuasi selama tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 persentase wanita yang menikah pada umur 25 tahun ke atas adalah 8,77 persen, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi sekitar 8,70 persen. Pada tahun 2016 persentase wanita yang menikah pada umur 25 tahun ke atas meningkat menjadi 9,86 persen.

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kependudukan adalah menyukseskan program Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak

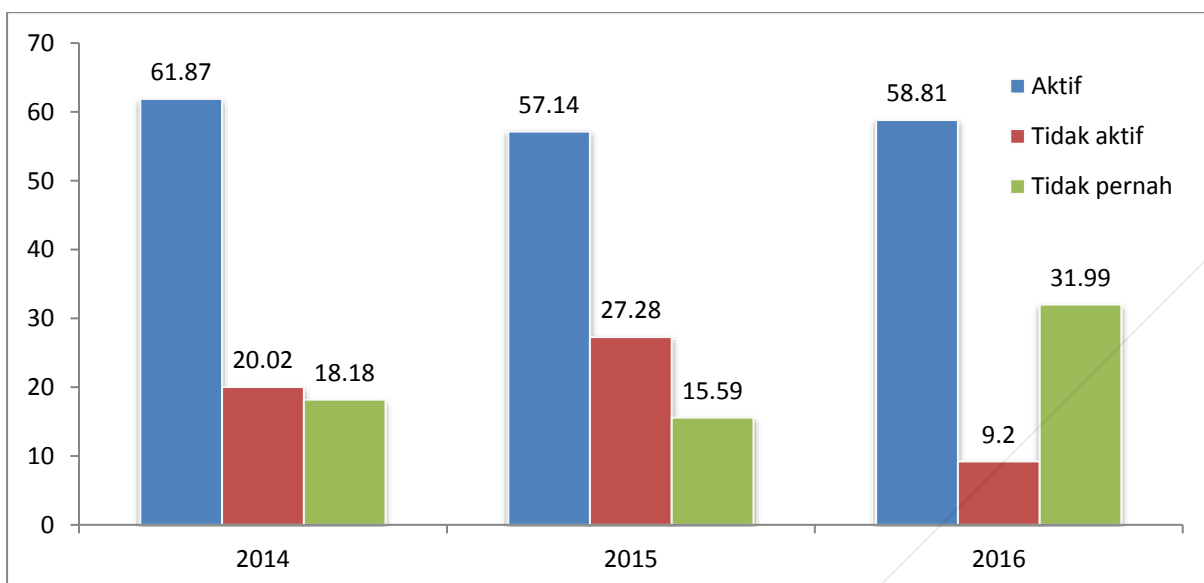
serta mewujudkan keluarga kecil bahagia melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat kontrasepsi KB. Melalui alat kontrasepsi, wanita dapat mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah kelahiran.

**Gambar 1.2:**  
**Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Partisipasi ber-KB di Kabupaten Pemalang Tahun 2016**



Jika dilihat di Gambar 1.2, persentase wanita umur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat kontrasepsi ada sebanyak 58,81 persen, sementara persentase wanita yang pernah menggunakan alat kontrasepsi dan sekarang sudah tidak menggunakan lagi sebanyak 9,20 persen dan sisanya sebanyak 31,99 persen yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

**Gambar 1.3:**  
**Persentase Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016**



Gambar 1.3 menyajikan persentase penggunaan/pemakaian alat/cara KB selama periode tahun 2014-2016 menunjukkan angka yang menurun meskipun tidak terlalu tajam. Pada tahun 2014 persentase wanita umur 15-49 tahun dan berstatus kawin atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 61,87 persen dan pada tahun 2015 sebesar 57,14 persen, sedangkan tahun 2016 menjadi 58,81 persen. Hal ini disebabkan oleh relatif stabilnya akseptor KB yang keluar (drop out) yaitu 20,02 persen pada tahun 2014, menjadi 27,28 persen pada tahun 2015, dan tahun 2016 menjadi 9,20 persen. Sementara itu, persentase wanita yang sama sekali tidak pernah menggunakan alat/cara KB dari tahun 2014-2016 berfluktuasi, yaitu 18,18 persen di tahun 2014, turun menjadi 15,59 persen di tahun 2015 dan naik menjadi 31,99 persen di tahun 2016.

Tabel 1.8 menyajikan dari 57,14 persen wanita umur 15-49 tahun pengguna alat kontrasepsi, cara yang paling banyak digunakan antara lain adalah Suntik KB (69,33 persen), Pil KB (14,54 persen), Kontap (5,34 persen) dan Susuk KB (4,50 persen). Sementara kondom dan lain-lain merupakan alat kontrasepsi yang penggunaannya paling rendah yaitu sebesar 1,93 persen.

Berdasarkan Tabel 1.11 persentase akseptor KB menurut jenis alat/cara KB yang dipakai tampak bahwa akseptor yang menggunakan Suntik KB menempati urutan tertinggi selama periode tahun 2014-2016, yaitu sekitar 70,93 persen pada tahun 2014, 70,55 persen pada tahun 2015, dan 69,33 persen pada tahun 2016. Tingginya persentase penggunaan alat kontrasepsi Suntik KB disebabkan alat ini relatif praktis, mudah pemakaiannya (tidak membuat akseptor malu/risih pada saat pemasangan seperti misalnya IUD) dan efek sampingnya juga tidak terlalu besar, sehingga untuk wanita yang sibuk, cenderung lebih memilih jenis alat kontrasepsi ini. Kelebihan lain dari alat kontrasepsi ini adalah jika akseptor ingin berhenti, bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Alat/cara ini relatif lebih aman bagi kebanyakan wanita dan relatif lebih murah dan mudah didapatkan.

**Tabel 1.8:**  
**Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Digunakan, Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

Jenis Alat KB	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Kontap	3,92	4,30	5,34
IUD/Spiral	4,05	4,28	4,36
Suntikan	70,93	70,55	69,33
Susuk	7,04	7,11	4,50
Pil KB	13,16	12,50	14,54
Kondom dll	0,90	1,26	1,93

---

Sumber: Susenas 2014-2016

Berkurangnya akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi berupa Susuk KB dan AKDR/IUD/spiral, diikuti oleh semakin bertambahnya akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi Susuk dan Kondom dan lain-lain. Sedangkan pemakaian alat kontrasepsi berupa Kontap dan Pil KB mengalami persentase yang fluktuatif.

<http://pemalangkab.bps.go.id>

---

## **BAB II**

# **KESEHATAN**

<http://pemalangkab.bps.go.id>

## **BAB II KESEHATAN**

Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka proses dan dinamika pembangunan ekonomi di wilayah tersebut akan semakin baik. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Peningkatan kualitas hidup penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah angka kesakitan. Program pembangunan di bidang kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

### **2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat**

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Oleh karena itu, untuk mengukur status kesehatan digunakan indikator angka kesakitan. Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari yang terjadi selama satu bulan sebelum pencacahan.

Berdasarkan Tabel 2.1, angka kesakitan penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 mencapai 22,48 persen. Secara keseluruhan angka kesakitan di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 9,60 persen menjadi 18,13 persen di tahun 2015, dan kemudian naik lagi menjadi 22,48 persen.



Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan di Kabupaten Pemalang baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan relatif sama pada tahun 2016. Namun demikian angka kesakitan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi (22,39 persen) dibandingkan angka kesakitan penduduk perempuan (22,30 persen).

Dibandingkan selama periode 2014-2016, angka kesakitan untuk penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan yaitu dari 8,33 persen tahun 2014 menjadi 22,39 persen tahun 2016 untuk penduduk laki-laki dan dari 10,84 persen tahun 2014 menjadi 22,30 persen pada tahun 2016 untuk penduduk perempuan.

**Tabel 2.1:**  
**Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Menurut Jenis Kelamin,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

Angka Kesakitan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
L	8,33	18,53	22,39
P	10,84	17,74	22,30
L + P	9,60	18,13	22,48
Rata-rata Lama Sakit (hari)			
< 4	96,01	43,01	55,01
4 - 7	3,00	42,65	35,52
8 - 30	0,99	14,35	9,47

Sumber: Susenas 2014-2016

Berdasarkan Tabel 2.1 sebagian besar penduduk mengalami sakit selama 1-7 hari yakni sebesar 90,53 persen. Sementara yang mengalami sakit lebih dari 7 hari hanya sebesar 9,47 persen. Dibandingkan tahun 2014, lama sakit penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2016 relatif lebih lama. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 penduduk yang sakit di Kabupaten Pemalang mengalami durasi sakit lebih dari 7 hari sebanyak 0,99 persen meningkat menjadi 9,47 persen pada tahun 2016. Sedangkan penduduk yang durasi sakit kurang dari 8 hari menurun, yaitu 99,01 persen pada tahun 2014 menurun menjadi 90,53 persen pada tahun 2016.

## 2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan

penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

**Tabel 2.2:**  
**Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Pemalang, 2015-2016**

Jenis Kelamin	2015	2016
(1)	(3)	(4)
Laki-laki	57,36	51,37
Perempuan	55,87	52,35
Laki-laki + Perempuan	56,59	51,87

Sumber: Susenas 2015-2016

Berdasarkan Tabel 2.2, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan sebanyak 51,87 persen pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka persentase penduduk yang berobat jalan mengalami penurunan dimana persentasenya mencapai 56,59 pada tahun 2015.

Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, diketahui bahwa persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan (51,37 persen) tidak berbeda secara signifikan dengan penduduk perempuan yang berobat jalan (52,35 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan dalam berobat masih menjadi pilihan utama bagi laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan.

Jika dilihat dari persentase penduduk yang berobat jalan, masih ada 48,13 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat selain berobat jalan adalah mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Pada Tabel 2.3, alasan penduduk yang mengalami keluhan tidak berobat jalan adalah mengobati sendiri dimana persentasenya mencapai 77,78 persen. Kemudian disusul dengan alasan merasa tidak perlu sebesar 19,57 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya keadaannya juga relatif sama.

**Tabel 2.3:**  
**Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pematang Tahun 2015-2016**

<b>Alasan Tidak Berobat Jalan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(3)	(4)
Tidak punya biaya berobat	2,87	0,22
Tidak ada biaya transport	0,00	0,93
Tidak ada sarana transportasi	0,00	0,00
Waktu tunggu pelayanan lama	0,00	0,00
Mengobati sendiri	78,06	77,78
Tidak ada yang mendampingi	0,29	0,31
Merasa tidak perlu	18,32	19,57
Lainnya	0,46	1,19
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014-2016

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa praktek dokter/bidan merupakan tempat/cara berobat yang paling banyak dipakai oleh penduduk yang berobat jalan yaitu sebesar 52,90 persen. Kemudian disusul puskesmas/pustu sebesar 29,55 persen. Selama periode 2015-2016 tidak banyak perbedaan dalam hal persentase tempat cara/berobat yang digunakan oleh penduduk yang berobat jalan, tidak ada perbedaan yang signifikan.

**Tabel 2.4:**  
**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/Cara Berobat, Kabupaten Pematang Tahun 2015-2016**

<b>Tempat/Cara Berobat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	5,16	5,40
RS Swasta	5,36	5,64
Praktek Dokter/Bidan	53,80	52,90
Klinik/Praktik Dokter Bersama	6,51	7,89
Puskesmas/Pustu	29,65	29,55
UKBM	0,72	0,45
Praktik pengobatan Tradisional/Alternatif	0,68	2,28
Lainnya	1,21	0,62
Total	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2015-2016

Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Pelayanan yang aman dilakukan oleh Dokter atau Bidan pada saat proses kelahiran bayi.

**Tabel 2.5:**  
**Persentase Balita Menurut Penolong Terakhir Proses Kelahiran,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

<b>Penolong Terakhir Kelahiran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	12,51	20,91	19,27
Bidan	78,33	72,51	72,11
Tenaga Medis Lain	0,00	1,25	1,83
Dukun Bersalin	9,16	5,33	6,79
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014-2016

Tabel 2.5 menunjukkan persentase penolong kelahiran balita yang terakhir di Kabupaten Pemalang sebagian besar adalah oleh Bidan (72,11 persen) dan Dokter (19,27 persen). Tenaga kesehatan bidan cenderung lebih banyak dikunjungi karena bidan praktek maupun bidan desa aksesnya mudah serta biayanya pun terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.

Masih ada sebanyak 6,79 persen yang masih menggunakan tenaga non medis. Ini berarti bahwa tidak sedikit masyarakat Kabupaten Pemalang yang mempercayakan penolong proses kelahiran kepada Dukun bersalin, terutama di perdesaan. Hal ini kemungkinan karena masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh.

Dibanding tahun 2014, penolong proses kelahiran oleh tenaga medis mengalami sedikit peningkatan di tahun 2016. Pada tahun 2014 penolong proses kelahiran oleh tenaga medis adalah sebesar 80,84 persen dan meningkat menjadi 93,42 persen di tahun 2015, kemudian menurun sedikit di tahun 2016 menjadi 91,38 persen.

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata dapat

membantu masyarakat untuk berperilaku sehat. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan, pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, penambahan dan peningkatan kualitas petugas kesehatan, dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Salah satu tujuan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Dalam keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan peka, terhadap berbagai masalah kesehatan.

### 2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

**Tabel 2.6:**  
**Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2016**

<b>Jaminan Kesehatan yang Dimiliki</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)
BPJS Kesehatan	5,52	23,94
BPJS Ketenagakerjaan	0,37	0,80
Askes/Asabri/Jamsostek	5,24	3,99
Jamkesmas/PBI	34,81	27,06
Jamkesda	1,34	2,91
Asuransi Swasta	0,27	0,17
Perusahaan/Kantor	0,16	0,13
Tidak Memiliki	52,45	45,58
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2015-2016

---

Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah Jamkesmas/PBI (27,06 persen), BPJS Kesehatan (23,94 persen), dan Askes/Asabri/Jamsostek (3,99 persen). Masih ada 45,58 persen masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi tentang kepemilikan jaminan kesehatan.

<http://pemalangkab.bps.go.id>

---

## **BAB III**

# **PENDIDIKAN**

<http://pemalangkab.bps.go.id>

## **BAB III PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis serta merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Pendidikan dari segi kehidupan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia karena merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Dalam pembangunan, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapatkan perhatian paling besar. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang pendidikan. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan antar kelompok penduduk dan antara daerah, serta kualitas pendidikan yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif, merupakan beberapa permasalahan mendasar pendidikan.

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki).

### **3.1 Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan Tabel 3.1, penduduk Pematang berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum menamatkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar masih relatif tinggi yaitu 29,61 persen. Penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 41,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 70,91 persen. Persentase yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas SDM ataupun keterampilan



mereka semakin kompleks. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu hanya 0,70 persen.

**Tabel 3.1:**  
**Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	2014			2015			2016		
	L (2)	P (3)	L + P (4)	L (5)	P (6)	L + P (7)	L (8)	P (9)	L + P (10)
Tdk/blm pernah sekolah	4,11	9,47	6,83	4,27	10,25	7,31	2,98	6,55	4,80
Tdk/Blm tamat SD	22,38	25,01	23,72	24,67	24,11	24,38	24,16	25,44	24,81
SD/MI	39,29	37,67	38,47	38,95	37,16	38,04	41,82	40,79	41,30
SMP/MTs	19,31	15,18	17,21	17,33	15,49	16,40	12,81	14,32	13,58
SMA/MA	8,78	8,48	8,63	8,93	6,94	7,92	12,66	7,74	10,16
SMK	3,75	1,66	2,68	2,48	2,63	2,56	2,12	2,23	2,17
DI	0,15	0,40	0,28	0,64	0,28	0,46	0,30	0,18	0,24
DIII	0,59	0,31	0,42	0,64	0,62	0,63	0,55	0,38	0,46
S1/S2	1,64	1,82	1,73	2,09	2,52	2,30	2,60	2,37	2,48

Sumber: Susenas 2014-2016

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI lebih banyak dibandingkan persentase penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI pada tahun 2015, masing masing 71,52 persen untuk penduduk perempuan dan 67,89 persen untuk penduduk perempuan.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat pula bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki yang tamat di jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/MA lebih tinggi dibanding tingkat pendidikan penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang tamat SD/MI sebesar 41,82 persen, sedangkan persentase penduduk perempuan 40,79 persen. Penduduk laki-laki yang tamat SMA/MA sebesar 12,66 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya 7,74 persen. Sementara untuk jenjang SMP/MTs, persentase penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih rendah dari persentase penduduk perempuan, yaitu sebesar 12,81 persen berbanding 14,32 persen. Sementara itu, persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan hingga tingkat Diploma/Universitas sebesar 3,45 persen relatif sama dibandingkan persentase penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan Diploma/Universitas yaitu sebesar 2,93 persen.

Jika dilihat dari periode tahun 2014-2016, persentase tingkat pendidikan penduduk yang tamat SMP/MTs hingga Diploma/Univ relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, masing-masing sebesar 30,95 persen ditahun 2014, meningkat menjadi 30,27 persen di tahun 2015 dan turun sedikit 29,09 persen di tahun 2016.

### 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun diperoleh dari persentase jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Di Kabupaten Pemalang, pada tingkat sekolah dasar terdapat 99,64 persen penduduk telah bersekolah pada tahun 2016. Ini berarti bahwa ada sebanyak 0,36 persen anak berumur 7-12 tahun yang sedang tidak sekolah di Sekolah Dasar. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu tidak/belum pernah sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi.

**Tabel 3.2:**  
**Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,**  
**di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2014</b>			
7-12	100,00	99,24	99,66
13-15	94,31	91,17	92,74
16-18	67,61	51,26	59,92
<b>2015</b>			
7-12	98.91	100.00	99.43
13-15	93.05	92.96	93.01
16-18	65.49	55.17	60.41
<b>2016</b>			
7-12	100,00	99,21	99,64
13-15	89,33	89,87	89,61
16-18	60,04	51,93	56,01

Sumber: Susenas 2014-2016

---

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 89,61 persen dan penduduk yang berumur 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 56,01 persen. Selama kurun waktu 2014-2016, jumlah penduduk di semua kelompok umur yang masih sekolah mengalami penurunan. Jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan jumlah penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tahun 2014 masing-masing sebesar 99,66 persen dan 92,74 persen meningkat masing-masing menjadi 99,64 persen dan 89,61 persen di tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang masih sekolah juga mengalami penurunan yaitu dari 59,92 persen menjadi 56,01 persen.

Partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan relatif sama di setiap kelompok umur sekolah pada tahun 2016. Di kelompok umur 7-12 tahun partisipasi sekolah laki-laki 100,00 persen dan partisipasi sekolah perempuan 99,21 persen. Partisipasi sekolah untuk laki-laki di kelompok umur 13-15 tahun sebesar 89,33 persen, sedangkan partisipasi sekolah untuk perempuan sebesar 89,87 persen.

Pola yang digambarkan oleh partisipasi sekolah untuk penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda yaitu semakin tinggi kelompok umur sekolah maka partisipasinya semakin kecil. Dari gambaran partisipasi tersebut terlihat bahwa kesempatan antara penduduk perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan adalah sama.

### **3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Selama kurun waktu 2014-2016 APM di Kabupaten Pematang tidak banyak mengalami perubahan secara signifikan. Pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 95,14 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 74,10 persen, penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SMA/SMK/MA sebesar 48,80 persen.

**Tabel 3.3:**  
**Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin,**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2016**

Tahun/Jenjang Pendidikan	APM		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2014</b>			
SD	96,21	98,23	97,26
SMP	75,37	68,63	71,78
SMA/SMK/MA	53,36	44,40	48,83
<b>2015</b>			
SD	95,95	92,93	94,51
SMP	72,55	76,85	74,63
SMA/SMK/MA	49,13	49,16	49,14
<b>2016</b>			
SD	95,95	94,16	95,14
SMP	74,15	74,04	74,10
SMA/SMK/MA	51,42	46,13	48,80

Sumber: Susenas 2014-2016

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, APM untuk SD/MI mengalami fluktuasi, sementara APM SMP/MTs, SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Angka partisipasi sekolah untuk Sekolah Dasar meningkat yaitu dari 97,26 persen di tahun 2014 turun menjadi 94,51 persen di tahun 2015 kemudian naik menjadi 95,14 persen di tahun 2016. Sedangkan APM untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 71,78 persen di tahun 2014 menjadi 74,10 persen di tahun 2016. Pada tingkat SMA/SMK/MA, Angka Partisipasi Murni relatif tetap dari 48,83 persen di tahun 2014 menjadi 48,80 persen di tahun 2016.

### **3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua dibanding umur standar di jenjang pendidikan tertentu. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

**Tabel 3.4:**  
**Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Pemalang, 2014-2016**

Tahun/Jenjang Pendidikan	APK		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2014</b>			
SD/MI	109,08	113,83	111,55
SMP/MTs	85,13	75,29	80,32
SMA/SMK/MA	87,91	60,86	74,23
<b>2015</b>			
SD/MI	113,94	108,03	111,12
SMP/MTs	90,99	103,20	96,90
SMA/SMK/MA	71,63	74,99	73,29
<b>2016</b>			
SD/MI	108,36	106,68	107,52
SMP/MTs	88,84	86,42	87,61
SMA/SMK/MA	71,59	77,41	74,48

Sumber: Susenas 2014-2016

Seperti pada Tabel 3.4, APK SD/MI tahun 2016 sebesar 107,52 persen. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 87,61 persen dan 74,48 persen. Jika dibandingkan tahun 2014, APK baik SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. APK untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 80,32 persen menjadi 87,61 persen. Pada tingkat SMA/SMK/MA, APK meningkat dari 74,23 persen menjadi 74,48 persen. Sementara APK pada tingkat SD/MI cenderung turun yaitu dari sebesar 111,55 persen pada tahun 2014 menjadi 107,52 persen pada tahun 2016.

---

## **BAB IV**

# **PERUMAHAN**

<http://pemalangkab.bps.go.id>

## **BAB IV PERUMAHAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus berkembang

Keadaan perumahan adalah salah satu faktor yang menentukan keadaan higienis dan sanitasi lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh WHO bahwa perumahan yang tidak sehat dan terlalu sempit mengakibatkan mudah terjangkitnya penyakit dalam masyarakat. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan. Selain kualitas bahan bangunan yang digunakan dan juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, keadaan ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Tempat tinggal dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.

### **4.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal**

Luas rumah yang ditempati dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin tinggi status sosial suatu rumah tangga maka semakin luas lantai yang dikuasai rumah tangga. Oleh karena itu, luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Pada Tabel 5.1 menggambarkan luas lantai rumah (dalam meter persegi) yang ditempati rumah tangga. Di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sebesar 15,77 persen, dan yang menempati rumah dengan luas lantai 50 meter persegi keatas sebesar 84,23 persen.

**Tabel 4.1:**  
**Persentase Rumah tangga menurut Rata-rata Luas Lantai**  
**di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016**

<b>Luas Lantai (m2)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<20	1,89	1,95	0,60
20 – 49	26,32	20,07	15,17
50+	71,79	77,98	84,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014-2016

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai luas lantai 50 meter persegi atau lebih meningkat di tahun 2016. Rumah tangga dengan luas lantai 50 m2 ke atas yaitu sebesar 84,23 persen dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 71,79 persen. Sedangkan rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 50 meter persegi menurun di tahun 2016, yaitu sebesar 28,21 persen pada tahun 2014 menjadi 15,17 persen pada tahun 2016.

**Tabel 4.2:**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan, Kabupaten Pemalang, Tahun**  
**2014-2016**

<b>Kualitas Perumahan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah	82,90	84,99	83,41
Atap Layak	98,99	99,48	99,59
Dinding Permanen	92,77	93,95	95,59

Sumber: Susenas 2014-2016

Semakin banyak rumah tinggal yang menggunakan lantai bukan tanah mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perumahan di suatu daerah. Rumah tangga yang mempunyai rumah tinggal berlantai bukan tanah di Kabupaten Pemalang sebesar 83,41 persen pada tahun 2016, dapat dilihat di Tabel 4.2.

Secara keseluruhan, bila dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan, kondisi perumahan di Kabupaten Pemalang relatif memenuhi kriteria rumah sehat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase rumah tinggal dengan atap layak (99,59 persen) dan dinding permanen (95,59 persen).



## 4.2 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

**Tabel 4.3:**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016**

<b>Status Penguasaan Tempat Tinggal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	89,34	94,08	94,00
Kontrak/Sewa	0,71	1,16	0,59
Dinas/Bebas Sewa/Lainnya	9,95	4,76	5,41

Sumber: Susenas 2014-2016

Seperti pada Tabel 4.3, persentase rumah tangga di Kabupaten Pemalang yang menempati rumah sendiri sebesar 94,00 persen, dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 0,59 persen, sedangkan yang menempati rumah dinas/bebas sewa/lainnya sebesar 5,41 persen.

Dibanding tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri sedikit mengalami peningkatan, yaitu dari 89,34 persen pada tahun 2014 menjadi 94,00 persen pada tahun 2016. Persentase rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa juga mengalami penurunan yaitu dari 0,71 persen pada tahun 2014 menjadi 0,59 persen pada tahun 2016. Sementara itu, rumah tangga yang tinggal di rumah dinas atau bebas sewa menurun yaitu dari 9,95 persen pada tahun 2014 menjadi 5,41 persen pada tahun 2016.

## 4.3 Fasilitas Perumahan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunannya akan tetapi juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, seperti fasilitas penerangan, air minum, maupun jamban sendiri yang menggunakan tangki septik.

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 penggunaan fasilitas perumahan seperti penerangan listrik dan air bersih sudah relatif banyak dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan data Susenas 2016, seluruh rumah tangga di Kabupaten Pemalang sudah memiliki fasilitas penerangan listrik, 28,31 persen rumah tangga yang telah memiliki fasilitas air minum kemasan/leding, dan 74,52 persen memiliki jamban sendiri.

**Tabel 4.4:**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016**

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerangan Listrik	99,77	99,86	100,00
Air Minum Kemasan/Leding	19,82	25,39	28,31
Jamban Sendiri	67,51	69,23	74,52

Sumber: Susenas 2014-2016

Pemanfaatan fasilitas penerangan listrik pada tahun 2016 yang telah mencapai 100 persen, meningkat jika dibandingkan pemanfaatan fasilitas penerangan listrik pada tahun 2014 sebesar 99,77 persen. Penggunaan fasilitas jamban sendiri terus meningkat yaitu sebesar 67,51 persen di tahun 2014 menjadi 74,52 persen di tahun 2016. Penggunaan fasilitas air minum kemasan/leding meningkat, 19,82 persen pada tahun 2014 menjadi 28,31 persen pada tahun 2016.

#### **4.4 Penguasaan Alat Komunikasi**

Sesuai dengan perkembangan teknologi alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (*handphone*), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Berdasarkan Tabel 4.5, hanya sekitar 0,84 persen rumah tangga di Kabupaten Pemalang yang telah memiliki telepon, 52,08 persen rumah tangga yang memiliki telepon selular. Kepemilikan komputer bagi rumah tangga di Kabupaten Pemalang masih rendah yaitu hanya sebesar 10,82 persen.

**Tabel 4.5:**  
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, dan Komputer di Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2016**

<b>Alat Komunikasi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon	3,10	1,15	0,84
Telepon Selular	86,37	89,78	52,08
Komputer	7,93	10,26	10,82

Sumber: Susenas 2014-2016

Berdasarkan Tabel 4.5, persentase rumah tangga yang memiliki telepon berfluktuasi selama periode tahun 2014-2016 dari 3,10 persen pada tahun 2014 menurun menjadi 1,15 persen pada tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 0,84 persen pada tahun 2016. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat selama

---

periode tahun 2014-2015 dari 86,37 persen di tahun 2014 menjadi 89,78 persen di tahun 2015 dan menurun menjadi 52,08 persen pada tahun 2016.

Kepemilikan komputer juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2014-2016, yaitu dari 7,93 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 10,26 persen di tahun 2015 dan meningkat lagi menjadi 10,82 di tahun 2016.

<http://pemalangkab.bps.go.id>



**SENSUS  
EKONOMI**

**DATA**  
**MENCERDASKAN BANGSA**

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PEMALANG**

Jalan Tentara Pelajar 16 Pemalang

Telp/Fax : (0284) 321169 Email: [bps3327@bps.go.id](mailto:bps3327@bps.go.id)

Homepage: <http://pemalangkab.bps.go.id/>